

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa hal yang merupakan pendahuluan dari skripsi. Adapun paparan yang dimaksud adalah (1) latar belakang masalah, (2) perumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) struktur organisasi skripsi. Kelima hal tersebut dipaparkan secara berurutan di bawah ini.

A. Latar Belakang Masalah

Teori sosial dan politik yang umum dipelajari hari ini sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung sekitar dua abad lalu. Hal tersebut jarang disadari bahwa gelombang revolusi berikutnya yang lebih dahsyat sedang berlangsung saat ini. Revolusi tersebut diyakini akan mengubah serta melahirkan teori dan praktik sosial baru yang mungkin belum pernah terprediksikan sebelumnya. Revolusi tersebut juga memiliki dampak yang sangat luas dan dalam pada peradaban manusia. Gelombang perubahan inilah yang disebut dengan revolusi digital. Ditandai dengan kehadiran internet yang masif dan perlahan menggantikan berbagai perangkat teknologi, seperti radio, televisi, koran, dan media konvensional yang mulai dilupakan karena dominasi peran Google dan Youtube (Prasetyo, 2006).

Gilardi (2016), dalam penelitian terbarunya tentang *digital democracy*, menjelaskan dengan jelas mengenai pengaruh teknologi digital terhadap proses

demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Tidak hanya di Negara Barat, tetapi juga di belahan dunia mana pun di saat teknologi digital mulai mendominasi. Tidak hanya pada praktik politik dalam demokrasi kontemporer, revolusi teknologi digital ini juga secara langsung telah memengaruhi ilmu-ilmu sosial direproduksi dan disebarluaskan. *Big data*, sains kompleksitas, *crowd sourcing*, mesin pembelajaran baru, hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi rujukan dunia pun turut beradaptasi dengan revolusi digital ini. Demokrasi digital adalah era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri.

Dalam demokrasi digital, media percakapan dan rapat tatap muka itu telah digantikan perangkat telepon pintar yang menghapus hambatan sekat dan jarak. Orang terhubung dan teralienasi sekaligus dengan sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Persis seperti demokrasi ala pilkada Jakarta saat ini, di saat kemenangan politisi akan sangat ditentukan dengan kemenangannya merebut simpati pengguna internet, bahkan dari pengguna internet yang tidak memiliki hak pilih sekalipun. Suara pemilih tidak lagi terbatas pada ruang administratif kependudukan karena opini pemilih bisa sangat dipengaruhi oleh tanggapan dari warga di luar arena pertarungan. Meski demikian, spekulasi dalam demokrasi digital ini semakin terukur dan secara ekonomi semakin efisien.

Di era globalisasi saat ini, media memiliki peran penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan Telekomunikasi dan Informatika (IT) telah memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk

menggunakan media sebagai sarana dalam menyampaikan berbagai ide, pikiran, pendapat, kritik, dan saran.

Salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan ideologi dalam bentuk wacana/teks adalah media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2016, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari angka tersebut, 95 persen menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Laman media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat di Indonesia adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook terbesar setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat kelima pengguna Twitter terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris.

Penggunaan media sosial telah memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk kontribusi media sosial terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah upaya partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menggunakan media sosial untuk membahas isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan perilaku para tokoh publik. Media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat, terutama pada ranah sosial dan politik. Sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia juga sering menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dalam mendekati diri dengan masyarakat. Selain sebagai sarana untuk berkomunikasi,

media sosial juga digunakan sebagai sarana mensosialisasikan, mempromosikan diri, dan mempromosikan partai politik guna membangun citra politik. Tidak sedikit calon pemimpin dan partai politik menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kampanye politik ketika akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Wacana/teks yang disampaikan di media sosial, seperti Facebook atau Twitter merupakan salah satu upaya partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Wacana di media sosial dapat pula membawa nilai-nilai baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan ideologi yang berbeda dari setiap individu atau kelompok masyarakat tertentu mengenai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Selain itu, wacana/teks di media sosial dapat dimanfaatkan oleh Partai Politik (Parpol) dan tim sukses kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 untuk menarik simpatik dalam berkampanye, seperti mengeluarkan ide, menceritakan diri, isu-isu politik, dan memberikan informasi mengenai program-program yang akan dilakukan oleh kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2017.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis wacana kritis sebagai “payung besar” untuk menganalisis data-data penelitian berupa wacana/teks di media sosial mengenai Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Eriyanto (2001, hlm. 6)

mengungkapkan bahwa analisis wacana paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Hal ini diartikan bahwa individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang dapat menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Praktik wacana kritis dapat menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antarkelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Inti pentingnya bahwa ideologi menjadi suatu senjata aktif yang ada dalam muatan wacana kritis, karena pembentukan ide-ide serta berbagai pola pikir menjadi suatu keharusan yang di dalamnya memiliki muatan tertentu (Eriyanto, 2001).

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001, hlm. 7) bahwa analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Di Indonesia, penelitian mengenai mengenai wacana partisipasi politik di media sosial pernah dilakukan oleh Anantyo (2013), yang melakukan penelitian mengenai analisis wacana kritis *tweets* @triomacan2000 pada masa kampanye Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Anantyo

(2013) bertujuan untuk mengetahui identitas yang terbentuk dalam penyampaian informasi mengenai skandal politik semasa Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang dilakukan oleh akun Twitter @triomacan2000 dengan menganalisis wacana/teks yang disampaikan melalui Twitter. Berdasarkan hasil penelitian, wacana/teks yang disampaikan oleh akun Twitter @triomacan2000 bertujuan untuk menggiring opini masyarakat agar memilih pemimpin yang terbaik. Pemilihan kata dan bahasa yang represif meletakkan Jokowi-Ahok dan Fauzi Bowo sebagai pemimpin yang tidak layak untuk memimpin DKI Jakarta. Analisis wacana/teks pada *tweets* @triomacan2000 menunjukkan adanya aktor sentral dalam produksi pesan yang dilakukan oleh @triomacan2000. Penggunaan pseudonim melindungi aktor di balik akun @triomacan2000 dari resiko personal sekaligus menebalkan keberanian untuk terus menyampaikan informasi skandal publik tersebut.

Selain itu, penelitian mengenai wacana partisipasi politik di media sosial juga pernah dilakukan oleh Mulyadi (2015), mengenai gerakan sosial di media sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY di Twitter. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2015) bertujuan untuk mendeskripsikan wacana gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY sebagai upaya perlawanan di media sosial, khususnya Twitter. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis model Theo Van Leeuwen, yang secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor yang ditampilkan dalam teks. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, wacana/teks dalam *hashtag* #ShameOnYouSBY di Twitter yang digunakan oleh masyarakat bertujuan untuk menentang pemegang kekuasaan para elit politik karena gaya atau sistem kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

selaku pemegang kekuasaan, relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat dominan, sehingga perlawanan adalah sesuatu yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan itu sendiri dimana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi atau perlawanan. Di sini masyarakat menggambarkan pemegang kekuasaan (dalam hal ini SBY) dalam pembahasan RUU Pilkada menyepakati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pencitraan dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Di sisi lain, penelitian ini juga melahirkan refleksi teoritis dalam memahami ruang publik, bahwa ruang diskusi dan ekspresi di internet belum dapat disejajarkan dengan ruang publik ideal seperti yang digambarkan oleh Habermas.

Penelitian lainnya mengenai wacana partisipasi politik di media sosial pernah dilakukan oleh Sitompul (2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2015), media sosial Twitter digunakan sebagai pembentuk pemikiran politik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial, seperti Twitter berperan dalam pembentukan pemikiran politik mahasiswa dan posisi media sosial Twitter sebagai media informasi terutama pengetahuan politik mahasiswa. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat terlihat bagaimana mahasiswa menyampaikan pemikirannya melalui wacana/teks pada media sosial, seperti Twitter, meskipun menggunakan kata yang singkat dan sederhana, tetapi makna dan maksud yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembacanya. Peran Twitter juga terlihat sebagai media yang berperan dalam

pembentukan pemikiran politik mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat melalui wacana/teks yang disampaikan oleh mahasiswa dalam menanggapi debat politik yang dilakukan di televisi. Wacana/teks yang disampaikan oleh mahasiswa pada Twitter telah menggambarkan adanya partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu mengenai penelitian di dalam domain wacana partisipasi politik di media sosial yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis melihat fenomena wacana berupa teks partisipasi politik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Wacana yang disampaikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta di Facebook dan Twitter merupakan bentuk representasi dari upaya partisipasi politik masyarakat dalam mengemukakan ideologi menjadi suatu senjata aktif dalam membentuk ide-ide serta berbagai pola pikir menjadi suatu keharusan yang di dalamnya memiliki muatan tertentu, khususnya terkait isu Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017.

Dalam pandangan penulis, persoalan-persoalan tersebut merupakan wujud persoalan derivatif yang berada dalam domain komunikasi yang dibedakan melalui pisau analisis wacana kritis. Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan, persoalan wacana/teks partisipasi politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial, seperti Facebook dan Twitter sangat terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan wacana/teks partisipasi politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial, seperti Facebook dan Twitter.

B. Rumusan Masalah

Dalam praktik penelitian, untuk mengungkap masalah partisipasi politik dalam wacana Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Yogyakarta mengenai Partisipasi Politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial?
2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan masyarakat Kota Yogyakarta mengenai Partisipasi Politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial.
2. Mengetahui pengaruh media sosial terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis, maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Sumbangsih bagi bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang mengkaji wacana partisipasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) di media sosial.
- b. Referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji wacana lisan atau tulisan mengenai partisipasi politik di media.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat praktis. Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, pikiran, pendapat, kritik, dan saran.
- b. Memberikan masukan bagi tokoh-tokoh politik yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mempromosikan diri, mempromosikan partai politik guna membangun citra politik dan melakukan kampanye politik secara baik dan benar.

E. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis akan menyampaikan penelitian terdahulu mengenai penelitian di dalam domain partisipasi politik dalam wacana politik di media sosial yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan, sehingga jelas perbedaannya dengan penelitian terdahulu.

Penelitian di Dalam Domain Wacana Partisipasi Politik di Media Sosial

Di Indonesia, penelitian mengenai wacana partisipasi politik di media sosial pernah dilakukan oleh Anantyo (2013), yang melakukan penelitian mengenai analisis wacana kritis *tweets* @triomacan2000 pada masa kampanye Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Anantyo (2013) bertujuan untuk mengetahui identitas yang terbentuk dalam penyampaian informasi mengenai skandal politik semasa Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang dilakukan oleh akun Twitter @triomacan2000 dengan menganalisis wacana/teks yang disampaikan melalui Twitter. Berdasarkan hasil penelitian, wacana/teks yang disampaikan oleh akun Twitter @triomacan2000 bertujuan untuk menggiring opini masyarakat agar memilih pemimpin yang terbaik. Pemilihan kata dan bahasa yang represif meletakkan Jokowi-Ahok dan Fauzi Bowo sebagai pemimpin yang tidak layak untuk memimpin DKI Jakarta. Analisis wacana/teks pada *tweets* @triomacan2000 menunjukkan adanya aktor sentral dalam produksi pesan yang dilakukan oleh @triomacan2000. Penggunaan pseudonim melindungi

aktor di balik akun @triomacan2000 dari resiko personal sekaligus menebalkan keberanian untuk terus menyampaikan informasi skandal publik tersebut.

Selain itu, penelitian mengenai wacana partisipasi politik di media sosial juga pernah dilakukan oleh Mulyadi (2015), mengenai gerakan sosial di media sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY di Twitter. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2015) bertujuan untuk mendeskripsikan wacana gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY sebagai upaya perlawanan di media sosial, khususnya Twitter. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis model Theo Van Leeuwen, yang secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor yang ditampilkan dalam teks. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, wacana/teks dalam *hashtag* #ShameOnYouSBY di Twitter yang digunakan oleh masyarakat bertujuan untuk menentang pemegang kekuasaan para elit politik karena gaya atau sistem kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pemegang kekuasaan, relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat dominan, sehingga perlawanan adalah sesuatu yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan itu sendiri dimana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi atau perlawanan. Di sini masyarakat menggambarkan pemegang kekuasaan (dalam hal ini SBY) dalam pembahasan RUU Pilkada menyepakati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pencitraan dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Di sisi lain, penelitian ini juga melahirkan refleksi teoritis dalam memahami ruang publik, bahwa ruang diskusi dan ekspresi di internet

belum dapat disejajarkan dengan ruang publik ideal seperti yang digambarkan oleh Habermas.

Penelitian lainnya mengenai wacana partisipasi politik di media sosial pernah dilakukan oleh Sitompul (2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2015), media sosial Twitter digunakan sebagai pembentuk pemikiran politik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial, seperti Twitter berperan dalam pembentukan pemikiran politik mahasiswa dan posisi media sosial Twitter sebagai media informasi terutama pengetahuan politik mahasiswa. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat terlihat bagaimana mahasiswa menyampaikan pemikirannya melalui wacana/teks pada media sosial, seperti Twitter, meskipun menggunakan kata yang singkat dan sederhana, tetapi makna dan maksud yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembacanya. Peran Twitter juga terlihat sebagai media yang berperan dalam pembentukan pemikiran politik mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat melalui wacana/teks yang disampaikan oleh mahasiswa dalam menanggapi debat politik yang dilakukan di televisi. Wacana/teks yang disampaikan oleh mahasiswa pada Twitter telah menggambarkan adanya partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa.

F. Kerangka Teori

Dalam bagian ini, penulis akan menyampaikan landasan teoretis yang meringkaskan kajian ini, yaitu mengenai (1) Analisis Wacana Kritis (AWK), (2)

Partisipasi Politik, (3) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), (4) Demokrasi Digital, dan (5) Media Sosial.

1. Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa proses penafsiran seperti pada analisis konstruktivisme. Sejalan dengan hal tersebut Eriyanto mengungkapkan bahwa analisis wacana paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2001, hlm. 6). Hal ini diartikan bahwa individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang dapat menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Eriyanto (2001, hlm. 6) menjelaskan mengenai posisi bahasa dalam pandangan wacana kritis bahwa bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Hal ini dapat dipahami karena analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, dan topik yang dibicarakan. Dalam pandangan kritis, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam membentuk hubungan kekuasaan, terutama dalam membentuk subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

a. Karakteristik Analisis Wacana Kritis

Dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis di sini sedikit berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan konteks dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001, hlm. 7) menyatakan bahwa analisis wacana merupakan pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial yang menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.

Pada intinya, praktik wacana kritis dapat menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Inti pentingnya bahwa ideologi menjadi suatu senjata aktif yang ada dalam muatan wacana kritis, karena pembentukan ide-ide serta berbagai pola pikir menjadi suatu keharusan yang di dalamnya memiliki muatan tertentu (Eriyanto, 2001).

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam

masyarakat terjadi. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001, hlm. 7) bahwa analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Teun A. van Dijk, Fairclough dan Wodak menyajikan beberapa karakteristik penting dari analisis wacana yang digabungkan oleh Eriyanto (2001) dalam penjelasan ini sebagai berikut.

1. Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Dengan pemahan seperti ini, ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai situasi, peristiwa, dan kondisi sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi peristiwa, dan kondisi. Wacana disini dipandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Titik tolak dari analisis wacana disini, bahasa tidak bisa dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, bukan suatu objek yang diisolasi dalam ruang tertutup. Titik perhatian dari

analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi.

3. Historis

Salah satu aspek penting untuk dapat mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks histori tertentu. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya.

4. Kekuasaan

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Hal ini mengimpikasikan wacana kritis tidak membatasi dirinya pada detil teks atau struktur wacana saja tetapi menghubungkan juga dengan kekuasaan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

Kekuasaan ini dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Kontrol di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik tetapi juga kontrol secara mental maupun psikis. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Bisa berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan.

5. Ideologi

Ideologi merupakan konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.

Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara intern bersifat sosial, tidak personal atau individual: ia membutuhkan share di antara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas dari kelompok, membedakan dengan kelompok lain. Dengan pandangan semacam ini, wacana lalu tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah, karena dalam wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi dan berebut pengaruh.

b. Norman Fairclough

Seperti Van Dijk, analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahwa dalam ruang

tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu. Dalam hal ini, dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Bahasa secara sosial dan kritis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, harus dipisahkan pada bagian bahasa itu terbentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Darma, 2009, hlm. 89).

Fairclough membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemahaman sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering juga disebut model perubahan sosial (*social change*). Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Bahasa sebagai praktik sosial mengandung implikasi. *Pertama*, wacana adalah bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia realita. Pandangan ini tentu saja menolak pandangan bahasa sebagai bentuk individu. *Kedua*, model ini mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik dan institusi tertentu seperti pada buku, pendidikan, sosial, dan klasifikasi (Fairclough dalam Darma, 2009, hlm. 89).

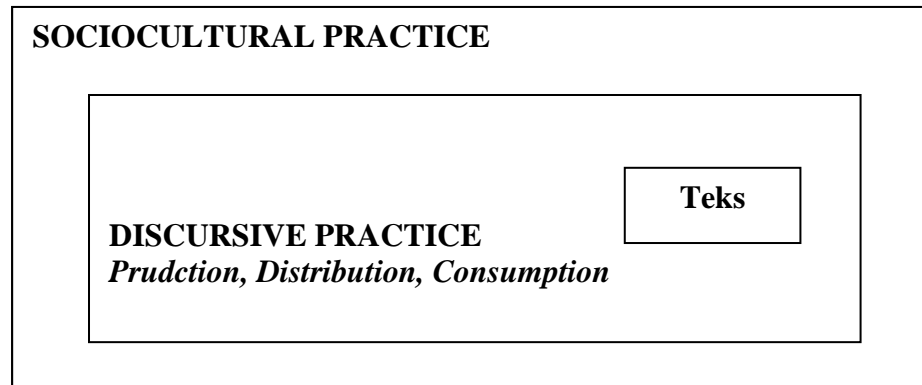
Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Dalam model Fairclough, teks

dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antara kata atau kalimat tersebut digabung, sehingga membentuk pengertian, semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. *Pertama*, ideasional yang merujuk pada referensi tertentu, yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologi tertentu. *Kedua*, relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan pembicara, seperti apakah tekad disampaikan secara informal, terbuka, dan tertutup. *Ketiga*, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas penulisan dan pembaca serta bagaimana personel dan identitas ini hendak ditampilkan (Darma, 2014, hlm. 127-128).

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Produksi teks cerita semacam ini berbeda dengan ketika seorang penyiar menghasilkan teks puisi, yang umumnya dihasilkan dalam suatu proses yang personal. Konsumsi juga dihasilkan secara personal ketika seseorang mengkonsumsi teks (seperti ketika menikmati puisi) (Darma, 2014, hlm. 127-128).

Dimensi *sociocultural practice* adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks, di sini memasukan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dan praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Ketiga dimensi diatas dapat digambarkan sebagai berikut (Darma, 2014, hlm. 128).

Analisis Wacana Kritis



Model Norman Fairclough

Sumber: Fairclough, 1995, hlm. 98

c. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Fairclough telah mengonstruksi kerangka yang penting untuk menganalisis wacana sebagai praktik sosial yang akan kita uraikan secara terinci. Seperti yang kami lakukan ketika dalam menguraikan konsep Laclau dan Mouffe, di sini kami dihadapkan pada ledakan konsep karena kerangka Fairclough berisi sederet konsep yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain dalam model tiga dimensi yang kompleks. Selanjutnya, makna konsep-konsep tersebut agak beragam dalam karya Fairclough yang berbeda kerangka yang senantiasa mengalami perkembangan. Pada kasus-kasus dimana perubahan-perubahan konseptual sangat penting bagi pemahaman kerangka yang dikemukakan Fairclough, kami akan memberikan pemahaman khusus pada perubahan-perubahan konseptual tersebut. Pada bagian bahasan pertama ini, kami menyajikan kerangka Fairclough melalui uraian konsep-konsep utama dan

kemungkinan menjelaskan keterkaitannya satu sama lain. Uraian tersebut kemudian diikuti oleh salah satu contoh empiris Fairclough yang menggambarkan penerapan kerangka tersebut (Darma, 2014, hlm. 128-129).

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, perbedaan penting antara Fairclough (dan analisis wacana kritis secara umum) dan teori wacana poststrukturalis adalah bahwa pada analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipandang bersifat konstitutif, tetapi juga tersusun. Pendekatan Fairclough intinya menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang memproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus bentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. Oleh sebab itu, wacana memiliki hubungan dialektika dengan dimensi-dimensi sosial yang lain. Fairclough memahami struktur sosial sebagai hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus dan yang terdiri atas unsur-unsur kewacanaan dan nonkewacanaan (Fairclough, 1995, hlm. 64). Praktik nonkewacanaan primer misalnya, adalah praktik fisik yang terlibat dalam pembangunan jembatan, sebaliknya praktik-praktik seperti jurnalisme dan hubungan masyarakat terutama bersifat kewacanaan (Fairclough 1995, hlm. 66).

Sekaligus, Fairclough membuat jarak dengan strukturalisme dan lebih condong ke posisi yang lebih bersifat poststrukturalis saat menyatakan bahwa praktik kewacanaan tidak hanya mereproduksi struktur kewacanaan yang telah ada tapi juga memantang struktur dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apa yang terdapat di luar struktur itu.

Akan tetapi, dia menyimpang cukup besar dari teori wacana poststrukturalis karena memusatkan perhatiannya pada upaya membangun suatu model teoretis dan piranti metodologis yang digunakan untuk penelitian empiris dalam interaksi sosial sehari-hari. Berlawanan dengan kecenderungan poststrukturalis, dia menekankan pentingnya melakukan analisis sistematis bahasa tutur dan tulis misalnya pada media massa dan wawancara penelitian.

Pendekatan Fairclough merupakan bentuk wacana analisis yang berorientasi pada teks dan yang berusaha menyatukan tiga tradisi (Fairclough, 1995, hlm. 72), yakni sebagai berikut.

1. Analisis tekstual yang terinci di bidang linguistik (termasuk tata bahasa fungsional Michael Halliday).
2. Analisis makro-sosiologis praktik sosial (termasuk teori Fairclough, yakni tidak menyediakan metodologi untuk menganalisis teks-teks khusus).
3. Tradisi interpretative dan mikro-sosiologis dalam sosiologi (termasuk etnometodologi dan analisis percakapan), dimana kehidupan sehari-hari diperlukan sebagai produk tindakan orang-orang. Tindakan tersebut mengikuti sederet prosedur dan kaidah “akal sehat”.

Fairclough menggunakan analisis teks yang terinci untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana proses kewacanaan beroperasi secara linguistik dalam teks-teks khusus. Akan tetapi, dia mengkritik pendekatan linguistik yang hanya semata-mata memusatkan perhatian pada analisis tekstual dan menggunakan pemahaman simplisistis dan palsu tentang hubungan antara teks dan masyarakat. Bagi Fairclough, analisis teks itu sendiri tidaklah memadai bagi

analisis wacana, dan juga tidak bisa menjelaskan hubungan antara struktur dan proses cultural dan kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan perspektif interdisipliner yang menggabungkan analisis tekstual dan sosial. Keuntungan yang bisa dipetik dari menggantungkan praktik sosial itu dibentuk oleh struktur sosial dan hubungan kekuasaan dan masyarakat tidaklah sadar atas protes tersebut. Kontribusi tradisi interpretatif adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat secara aktif menciptakan dunia yang terkait pada kaidah dalam praktik sehari-hari (Fairclough, 1995 dalam Darma, 2014, hlm. 130).

d. Model Tiga Dimensi Fairclough

1) Konsep-konsep utama

Fairclough menerapkan konsep wacana dengan menggunakan tiga hal yang berbeda.

1. Dalam pengertian yang paling abstrak, wacana mengacu pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial.
2. Wacana dipahami sebagai jenis bahasa yang digunakan dalam suatu bidang khusus, seperti wacana politik atau ilmiah.
3. Dalam penggunaan yang paling konkret, wacana digunakan sebagai suatu kata benda yang bisa dihitung (suatu wacana, wacana tertentu wacana-wacana, wacana-wacana tertentu) yang mengacu pada bertutur yang memberikan makna yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang dipetik dari perspektif tertentu.

Pada pengertian terakhir ini, konsep tersebut mengacu pada wacana apapun yang bisa dibedakan dari wacana-wacana lain, misalnya wacana feminis, wacana neoliberal, wacana Marxist, wacana konsumen, atau wacana environmentalis. Fairclough membatasi istilah itu yakni, wacana pada sistem semiotik seperti bahasa dan pencitraan yang berlawanan dengan Laclau dan Mouffe yang memperlakukan semua praktik sosial sebagai wacana.

Wacana memberikan kontribusi pada pengonstruksian (1) identitas sosial; (2) hubungan sosial; dan (3) sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, wacana memiliki tiga fungsi: fungsi identitas, fungsi “hubungan” atau relasional dan fungsi “ideasional”. Dalam analisis manapun, ada dua dimensi wacana yang sangat penting, yakni:

1. Peristiwa komunikatif – misalnya penggunaan bahasa seperti artikel surat kabar, film, video, wawancara atau pidato politik (Fairclough, 1995), dan
2. Tatanan wacana – konfigurasi semua jenis wacana yang digunakan dalam lembaga atau bidang sosial. Jenis-jenis wacana terdiri atas wacana dan aliran (aliran).

Analisis adalah penggunaan khusus bahasa yang berpartisipasi dalam dan menyusun bagian praktik sosial tertentu, misalnya aliran wawancara, aliran berita, atau aliran iklan. Contoh tatanan wacana mencakup tatanan wacana media, pelayanan kesehatan, atau rumah sakit individu. Dalam tatanan wacana, ada praktik-praktik kewacanaan khusus tempat dihasilkan dan dikonsumsi atau diinterpretasikannya teks dan pembicaraan (Fairclough, 1995, hlm. 145).

Setiap peristiwa penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas tiga dimensi, yakni sebagai berikut.

1. Teks (tuturan, pencitraan visual atau gabungan ketiganya).
2. Praktik kewacanaan yang melibatkan pemroduksian dari pengonsumsi teks.
3. Praktik sosial.

Adapun analisis peristiwa komunikatif meliputi:

1. analisis wacana dan aliran yang diwujudkan dalam memproduksi dan mengonsumsi teks (tingkat praktik kewacanaan);
2. analisis struktur linguistik (tingkat teks); dan
3. pertimbangan mengenai apapun praktik kewacanaan mereproduksi, bukannya merestrukturisasi tatanan wacana yang ada dan mengenai apa konsekuensi yang timbul bagi praktik sosial yang lebih luas (tingkat praktik sosial).

Tujuan umum model tiga dimensi itu adalah memberikan kerangka analisis bagi analisis wacana. Model ini didasarkan pada dan menggunakan prinsip yang berbunyi bahwa teks tidak pernah bisa dipahami atau dianalisis secara terpisah – hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan jaring-jaring teks lain dan hubungannya dengan konteks sosial.

2) Tatanan wacana dan peristiwa komunikatif

Fairclough memahami hubungan antara peristiwa komunikatif dan tatanan wacana sebagai hubungan yang bersifat dialektikal. Tatanan wacana merupakan suatu sistem, tetapi bukan sistem dalam pengertian strukturalis. Yakni, peristiwa-

peristiwa komunikatif tidak hanya mereproduksi tatanan wacana, tetapi juga memperluasnya melalui penggunaan bahasa yang kreatif. Misalnya, ketika petugas humas di rumah sakit menggunakan wacana konsumen, dia mengandalkan suatu sistem-tatanan wacana–namun untuk itu dia juga ambil bagian dalam menyusun sistem tersebut.

Bagaimanakah hubungan antara tatanan wacana dan konteks sosialnya? Dalam karya awalnya, Fairclough cenderung menghubungkan tatanan wacana dengan lembaga-lembaga khusus, sekaligus menekankan bahwa wacana dan tatanan wacana bisa bekerja lintas batas kelembagaan. Dalam bukunya yang ditulis bersama Chouliaraki, konsep “tatanan wacana” lain, dipasangkan dengan konsep “bidang” nya Pierre Bourdieu. Dengan kata lain, bagi Bourdieu, suatu bidang merupakan domain sosial yang relatif otonom yang mematuhi logika sosial khusus. Para aktor dalam suatu bidang khusus, seperti bidang olahraga, politik atau media, berjuang mencapai tujuan yang sama, dan dengan demikian bidang-bidang itu berhubungan satu sama lain dengan cara yang saling bersaing dimana posisi aktor individu yang berada di bidang itu ditetapkan oleh jarak relatifnya dari tujuan itu.

3) Antartekstualitas dan antarkewacanaan

Antarkewacanaan terjadi bila aliran dan wacana yang berbeda diartikulasikan bersama-sama dalam suatu peristiwa komunikatif. Praktik kewacanaan kreatif tempat digabungkan jenis-jenis wacana dengan cara yang baru dan kompleks – dalam “campuran antarkewacanaan” baru – merupakan suatu tanda dan daya

dorong ke arah perubahan kewacanaan dan juga perubahan sosio-kultural. Di sisi lain, praktik-praktik kewacanaan tempat bercampurnya wacana dengan cara-cara konvensional merupakan indikasi dan bekerjanya stabilitas tatanan wacana yang dominan dan dengan demikian juga tatanan sosial yang dominan.

Antarkewacanaan merupakan bentuk antartekstualitas. Antartekstualitas mengacu pada mengacu pada kondisi tempat bergantungnya peristiwa komunikatif pada peristiwa-peristiwa terdahulu. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari penggunaan kata-kata dan frasa-frasa yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain. Bentuk antartekstual yang terutama telah diucapkan sebelumnya adalah antartekstualitas yang menjelma (manifest antartekstualitas), sebaliknya teks secara jelas bergantung pada teks-teks lain, umpama saja dengan mengutipnya (Fairclough, 1995, hlm.117).

Suatu teks bisa dipandang sebagai hubungan dalam rantai intertekstual (Fairclough, 1995, hlm. 77). Serangkaian teks tempat masing-masing teks memasukkan unsur-unsur yang berasal dari teks atau teks-teks lain.

Aliran kritis mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang memperhatikan proses produksi dan reproduksi proposisi dari berbagai peristiwa komunikasi baik secara historis maupun secara institusi. Pandangan konstruktivisme belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. Aliran tersebut lebih mengutamakan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa

ditafsirkan secara bebas sesuai pikirannya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa menurut aliran kritis dipahami sebagai representasi yang berperan membentuk subjek tertentu, tema tertentu, dan strateginya. Oleh karena itu, analisis wacana mengungkapkan kekuasaan yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan yang diperkenankan menjadi wacana dan representasi yang terdapat dalam masyarakat (Darma, 2014, hlm. 133).

2. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu, *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004, hlm. 102-103).

Partisipasi politik merupakan proses di mana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagi aktivitas perencanaan; kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Melalui proses ini

berbagi pihak yang berkepentingan berusaha memengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol di saat merumuskan inisiatif-inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan dan menentukan sumber daya yang nantinya bisa memengaruhi mereka (Qodir, 2016).

Pada dasarnya, kesuksesan Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang di antaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintah didasarkan pada partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik di tingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum.

Surbakti dalam Cholisin (2007, hlm. 150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Menurut Budiarto dalam Cholisin (2007, hlm. 150), menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara

mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008, hlm. 369).

b. Dimensi Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam memilih cenderung rendah karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin malas untuk konstituen berspekulasi, bisa jadi hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi para peserta pemilu terhadap konstituennya atau telah apatisnya masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih sehingga dapat menjadi pemicu masuk dalam kategori apa yang dinamakan konstituen Golput.

Adapun dimensi partisipasi yang dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutip dalam bukunya Jalaludin Rakhmat yang berjudul Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain: (1) Gaya partisipasi; (2) Motif partisipasi; (3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik, (Rahkmat:2000).

Dengan mengacu pada penjelasan Jalaludin rakhmat diatas, maka Gaya partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa seperti di bawah ini:

1. Langsung/Perwakilan
2. Kentara/Tak Kentara
3. Individual/Kolektif

4. Sistematis/Acak
5. Terbuka
6. Berkomitmen
7. Derita

c. Tipologi Partisipasi Politik

Rahman (2007, hlm. 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut.

- 1) Partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) Partisipasi pasif adalah partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Individual adalah seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif non konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai

bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat apabila dilihat dari tiga ukuran, yaitu bersifat anti rezim melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit.

Partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut di atas. Di negara-negara berkembang, partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhataian dari berbagai kalangan.

d. Bentuk Partisipasi Politik

1. Kegiatan Pemilihan

Mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

2. Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud

memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan Organisasi

Tujuan utama dan eksplisitnya adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi ini dapat memutuskan usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau pada masalah umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik, tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi untuk memengaruhi keputusan Pemerintah.

4. Mencari Koneksi

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Bagaimana seseorang mencari koneksi untuk berpolitik sering dilakukan oleh para politisi dan simpatis politik sehingga muncul kebiasaan politik patronase ataupun *patront* dan *client* politik dalam masyarakat politik.

5. Tindakan Kekerasan

Upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Inilah politik kekerasan yang mengarah pada premanisme politik sepanjang sejarahnya di Indonesia.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam Mas'ood (2011, hlm. 57-58) yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi

politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional sebagai berikut.

1. Partisipasi Politik Konvensional

- a. Pemberian Suara
- b. Diskusi Politik
- c. Kegiatan Kampanye
- d. Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan
- e. Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik atau Administratif

2. Partisipasi Politik Non Konvensional

- a. Pengajuan petisi
- b. Berdemonstrasi
- c. Konfrontasi
- d. Mogok
- e. Tindakan Kekerasan Politik terhadap Harta Benda
- f. Tindakan Kekerasan Politik terhadap Manusia

e. Partisipasi Politik di Media Sosial

Informasi-informasi yang ditanam oleh Facebook sebagai media sosial untuk berkomunikasi dan berkampanye politik adalah informasi pribadi dari pelaku politik, ide gagasan, serta visi misinya. Informasi lain yang paling utama dan dominan adalah opini. Sebagai sarana komunikasi dan kampanye politik, politikus dapat menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dua arah dengan para pendukungnya, yang pada ujung-ujungnya membentuk berbagai opini.

Opini-opini inilah yang diolah dan dimanfaatkan bagi pelaku politik dan timnya dalam mendulang suara dari masyarakat luas (Wijayanto, 2010).

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

a. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR*”, tetapi setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen, sehingga pada Pasal 1 ayat (2) ini menjadi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Hal tersebut mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan MPR, tetapi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah, sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya Orde Baru.

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mereka kehendaki.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat karena melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup bagi rakyat supaya bebas dalam memilih pemimpinnya.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. Asas-asas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pada dasarnya, asas yang dipakai dalam Pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya Pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekitmen politik

agar kualitas wakil rakyat semakin baik (Najib dalam Marzuki, dkk, 2005, hlm. IX).

Asas Pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005.

Prinsip-prinsip Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sama seperti prinsip umum Pemilihan Umum (Pemilu) yang diuraikan sebagai berikut.

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

2) Umum

Pada dasarnya, semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna untuk menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3) Bebas

Setiap warga negara berhak memilih secara bebas dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara akan dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu, aparat pemerintah, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (Cipto, 2003, hlm. 217-219).

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara demokratis, sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tujuan Diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu tujuan dari dilakukannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Hal tersebut merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampaui mendominasi dan bahkan terkesan hegemoni (Nadir, 2005, hlm. 1).

Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya, rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide Pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung (Nadir, 2005, hlm. 15-17).

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat di suatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku.

Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh rakyat.

d. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sistem Pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik, tepatnya adalah penggunaan suara yang berbeda.

Menurut Joko (2005, hlm 212), Pilkada yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan dipilih dapat disebut dengan tak langsung, seperti sistem penegakan dan penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem perwakilan, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan kepada pejabat pusat. Sebaliknya, Pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipan, sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.

Joko (2005, hlm. 210) membedakan Pilkada langsung dan Pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada tak langsung rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton dalam proses Pilkada yang hanya melibatkan elite tertentu. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas. Dalam pilkada langsung, selalu ada tahap kegiatan langsung, selalu ada tahapan kegiatan, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Provinsi dan Banwaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Seorang Bupati sejajar dengan Wali Kota, yakni Kepala Daerah untuk daerah perkotaan. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena diusulkan oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung, rakyat memilih pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem pemilihan adalah mekanisme untuk menentukan pasangan calon yang akan menjadi Kepala Daerah. Sistem pemilihan akan menjadi tolak ukur kualitas Pilkada yang dilaksanakan. Selain itu, ketentuan tata cara untuk menetapkan calon terpilih.

Pada sistem Pilkada langsung, terdapat beberapa jenis system pemilihan yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat akan berlangsungnya Pilkada.

Sistem Pilkada langsung memuat tata cara dalam proses Pemilihan Kepala Daerah. Sistem Pilkada langsung memiliki sub sistem. Di Indonesia, sub-sistem ini dilaksanakan oleh KPUD sebagai pelaksana teknis dari pelaksanaan Pilkada langsung. KPUD melaksanakan fungsi sub-sistem Pilkada langsung yang terdiri dari sebagai berikut.

1) *Electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam peran dan fungsi masing-masing. Dalam sub ini, KPUD berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pilkada sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005.

2) *Electoral process*, yaitu seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat legal, maupun teknis. Dalam sub sistem ini, KPUD berkewajiban menangani persoalan teknis, administrasi dan logistik.

3) *Electoral Law Enforcement*, yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan Pilkada, baik politisi, administratif, maupun pidana. Dalam sub-sistem ini, KPUD berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahapan Pilkada (Prihatmoko, 2005, hlm. 187).

4. Demokrasi Digital

Teori sosial dan politik yang umum dipelajari hari ini sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung sekitar dua abad lalu. Hal tersebut jarang disadari bahwa gelombang revolusi berikutnya yang lebih dahsyat sedang berlangsung saat ini. Revolusi tersebut diyakini akan mengubah serta melahirkan teori dan praktik sosial baru yang mungkin belum pernah terprediksikan sebelumnya. Revolusi tersebut juga memiliki dampak yang sangat luas dan dalam pada peradaban manusia. Gelombang perubahan inilah yang

disebut dengan revolusi digital. Ditandai dengan kehadiran internet yang masif dan perlahan menggantikan berbagai perangkat teknologi, seperti radio, televisi, koran, dan media konvensional yang mulai dilupakan karena dominasi peran Google dan Youtube (Prasetyo, 2006).

Gilardi (2016), dalam penelitian terbarunya tentang *digital democracy*, menjelaskan dengan jelas mengenai pengaruh teknologi digital terhadap proses demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Tidak hanya di Negara Barat, tetapi juga di belahan dunia mana pun di saat teknologi digital mulai mendominasi. Tidak hanya pada praktik politik dalam demokrasi kontemporer, revolusi teknologi digital ini juga secara langsung telah memengaruhi ilmu-ilmu sosial direproduksi dan disebarluaskan. *Big data*, sains kompleksitas, *crowd sourcing*, mesin pembelajaran baru, hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi rujukan dunia pun turut beradaptasi dengan revolusi digital ini. Demokrasi digital adalah era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri.

Menurut Min (2010) mengenai *The Democratic Divide*, menunjukkan bahwa 43% dari pengguna internet di Amerika Serikat teridentifikasi sebagai *political internet user*, yaitu mereka yang secara sadar dan aktif menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi politik, maupun untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka juga aktif dan bergabung dalam kelompok diskusi politik di dunia maya. Profil pengguna internet yang aktif sebagai *political*

internet user itu masih sangat dipengaruhi faktor demografis seperti gender (laki-laki), pendidikan (tinggi), usia (muda), dan pendapatan (menengah atas).

Dalam demokrasi digital, media percakapan dan rapat tatap muka itu telah digantikan perangkat telepon pintar yang menghapus hambatan sekat dan jarak. Orang terhubung dan teralienasi sekaligus dengan sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Persis seperti demokrasi ala pilkada Jakarta saat ini, di saat kemenangan politisi akan sangat ditentukan dengan kemenangannya merebut simpati pengguna internet, bahkan dari pengguna internet yang tidak memiliki hak pilih sekalipun. Suara pemilih tidak lagi terbatas pada ruang administratif kependudukan karena opini pemilih bisa sangat dipengaruhi oleh tanggapan dari warga di luar arena pertarungan. Meski demikian, spekulasi dalam demokrasi digital ini semakin terukur dan secara ekonomi semakin efisien.

5. Media Sosial

Media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Hal ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak ke banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui unsur-unsur fundamental dari media sosial yaitu pertama, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan *online* menjadi saluran utama. Kedua, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. Ketiga, media sosial adalah partisipatif “penonton” dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar (Evans, 2008, hlm. 34).

Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Media sosial berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk mengekspresikan identitas diri. Partisipasi politik berawal dari kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan diri termasuk di dalamnya ide, pendapat, pilihan, maupun harapan. Ekspresi diri dari masing-masing anggota masyarakat ini kemudian menjadi unsur pembentuk opini publik ketika dikomunikasikan dengan baik. Selain berfungsi sebagai wadah ekspresi diri, media sosial di Indonesia juga menjadi ruang bagi publik untuk mengkritisi pemerintah (Rahmawati, 2013).

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Namun, sebagaimana yang ditekankan oleh Castells (2002), struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antarpengguna (*user*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet.

a. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog (blog mini) daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto dan video yang dibatasi 140 karakter huruf saja, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Sebuah buku yang ditulis oleh kolumnis *The New York Times*, Nick Bilton, mengungkap tentang sejarah berdirinya Twitter yang penuh intrik. Buku yang berjudul “*Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal*” itu berpusat pada empat karakter pendiri Twitter, serta CEO Twitter saat ini, Dick Costolo. Twitter didirikan oleh Evan Williams, Jack Dorsey, Christopher “Biz” Stone, dan Noah Glass, pada tahun 2006. Jejaring sosial berbasis *microblog* itu lahir setelah Odeo, *startup* (perusahaan rintisan) yang dibangun oleh Glass dan Williams pada tahun 2005, setelah mengalami kegagalan. Odeo fokus kepada layanan podcasting. Setelah itu kedua pendirinya mundur dari bisnis tersebut setelah iTunes Store milik Apple muncul dengan layanan serupa.

Glass dan Williams kemudian berdiskusi dengan rekan mereka, Jack Dorsey, yang saat itu tengah mengembangkan sebuah layanan *messaging* yang unik. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga bersama Biz Stone membangun sebuah startup baru bernama Obvious Corp. Di bawah Obvious Corp, mereka mengembangkan beberapa aplikasi, termasuk aplikasi messaging dengan kode nama “Twtr”. Mereka menambahkan dua huruf vokal ke dalam kode nama aplikasi itu, menjadi Twitter, dan merilisnya pada tahun 2006.

"...kami memilih kata 'twitter', dan itu sempurna. Defenisinya adalah 'ledakan singkat informasi tidak penting', dan 'celotehan burung'. Dan seperti itulah tepatnya produk ini. – Jack Dorsey (LA Times, 2009.)

Secara internasional, Twitter dikenal dengan logo burung birunya yang bernama "Larry the Bird". Logo asli digunakan sejak peluncuran Twitter pada 2006 hingga bulan September 2010. Versi modifikasi logo Twitter diluncurkan saat Twitter mendesain ulang situsnya untuk pertama kali. Pada 27 Februari 2012, seorang karyawan Twitter yang menangani platform dan API perusahaan berkicau mengenai evolusi logo "*Larry the Bird*", mengungkapkan bahwa logo tersebut dinamai berdasarkan Larry Bird, pemain NBA dari Boston Celtics (CNN, 2012). Pada 5 Juni 2012, Twitter meluncurkan logo ketiga yang di desain ulang, menggantikan "*Larry the Bird*" dengan logo baru yang dinamakan "Twitter Bird." Pada revisi logo ini, kata "twitter", dengan huruf "t" kecil, tidak lagi digunakan, dan burung menjadi satu-satunya simbol yang digunakan sebagai logo perusahaan (Freeman dalam Hananto, 2015).

Twitter sendiri sebagai sebuah perusahaan *start-up* berbasis media sosial telah menjadi sebuah perusahaan publik dengan melakukan IPO (Initial Public Offering) di bursa saham New York pada tanggal 11 November 2014 (www.kompas.com). Terlebih lagi penjualan saham Twitter kemudian menjadi rekor sebagai penjualan saham tertinggi sebelum kemudian dipecahkan oleh penjualan saham Alibaba yaitu raksasa website penjualan online dari Tiongkok. Hal ini berarti membutuhkan waktu 8 tahun semenjak Twitter didirikan sampai mampu menginjakan kakinya di lantai saham. Dalam konteks media sosial, saham

Twitter merupakan saham kedua yang dapat kita temui dibursa saham setelah Facebook melakukannya terlebih dahulu pada tahun 2012 yang lalu. Seiring berkembangnya unit bisnis Twitter, perusahaan ini pun akhirnya ikut melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di negara lain. Twitter membuka kantor cabang di Indonesia pada tahun 2014 ini tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2014 (www.kompas.com) dan sekaligus menjadikannya kantor perwakilan Twitter pertama di wilayah Asia Tenggara.

Twitter adalah contoh sempurna lain dari apa yang dinamakan gempuran globalisasi. Keberadaan kedua media tersebut sangat berdampak pada adanya perubahan nilai dan perilaku dalam masyarakat. Dengan adanya media sosial tersebut, orang merasa cukup untuk berkomunikasi dan menjalin relasi tanpa harus bertemu muka secara langsung dan tak lagi harus berbatas ruang dan waktu. Twitter juga telah merubah konsep pemasaran secara konvensional. Para kapitalis telah menemukan celah dalam ruang-ruang maya para pengguna Twitter yang dapat mereka masuki sebagai ruang pemasaran yang efektif dan efisien. Twitter telah menjadi rumah bagi para netizen (masyarakat internet) atau dalam bahasa Manuel Castell "*a network society*", masyarakat yang dikatakan oleh Castell serupa dengan masyarakat kapitalis dengan berbagai ragam ekspresi kelembagaannya. Ia menjelaskan bahwa networks, merupakan instrumen tepat bagi ekonomi kapitalis yang didasarkan pada inovasi, globalisasi dan desentralisasi konsentrasi (Castell dalam Lemert, 1999, hlm. 618).

Twitter telah dijadikan sebagai alat dari rezim kapitalisme global untuk menguasai pasar. Ia merubah nilai, sikap dan perilaku orang-orang yang terjerat

kedalam pesona semu kapitalisme melalui media Facebook dan Twitter. Nilai-nilai budaya timur atau ke-Indonesia-an yang dulu begitu kental dengan semangat gotong-royong, jalinan relasi yang begitu guyub dan rukun, solidaritas dan kesadaran kolektif yang begitu kental, kini semakin luntur dengan gempuran globalisasi yang merombak nilai-nilai tersebut. Facebook dan Twitter telah menjadikan masyarakat semakin konsumtif, cenderung menjadi penikmat teknologi dan semakin terlena dalam gaya hidup yang individualistik dan narsistik. Facebook dan Twitter secara nyata telah menjelma menjadi media untuk transfer pengetahuan yang kebarat-baratan, yang kemudian dijadikan sebagai role model. Pada akhirnya, masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia, akan selalu menjadi pasar yang menjanjikan bagi para kapitalis untuk memuaskan ambisi mereka mengeruk kemakmuran sebesar-besarnya.

b. Facebook

Berdasarkan data dari The Wall Street Journal (Dow Jones) (2012), Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang

sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat" (Sengupta, 2012).

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes (Carlson, 2010). Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei *Consumer Reports* bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki media sosial Facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini.

Menurut Kazeniac (2009), berdasarkan studi Compete.com pada Januari 2009, menempatkan Facebook sebagai layanan jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. *Entertainment Weekly* menempatkan Facebook di dalam daftar “terbaik” akhir dasawarsa dengan komentar "Bagaimana caranya kita menguntit mantan kekasih kita, mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan bermain *Scrabulous* sebelum Facebook diciptakan?" (Geier, dkk., 2009).

Quantcast memperkirakan Facebook memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada Mei 2011. Menurut *Social Media Today* (2010), sekitar 41,6% penduduk Amerika Serikat memiliki media sosial Facebook (Wells, 2010).

Meski begitu, pertumbuhan pasar Facebook mulai turun di sejumlah wilayah dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif di Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011.

Menurut Business Group Head Facebook Reynold D'Silva (2016), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah RGA Facebook terbesar di dunia. Jumlah pengguna aktif bulanan Facebook di Indonesia mencapai kisaran 82 juta orang pada kuartal-IV 2015. Jumlah tersebut bertambah dari 77 juta pengguna yang tercatat pada 2014. Angka tersebut mendekati jumlah keseluruhan pengguna internet di Indonesia pada 2015, sebesar 88,1 juta atau 34,9 persen dari total 252,4 juta penduduk. Dengan kata lain, hampir semua pengguna internet Indonesia turut menggunakan Facebook (Kompas.com, 15/4/2016).

Sebagian besar (94 persen) dari 82 juta pengguna Facebook Indonesia mengakses jejaring sosial tersebut dari perangkat mobile. Jumlah 82 juta berlaku untuk pengguna aktif bulanan, yakni mereka yang mengakses Facebook paling tidak sekali dalam waktu satu bulan. Untuk pengguna aktif harian (*daily active user*) yang selalu membuka Facebook setiap hari, angkanya tercatat sebesar 43 juta. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia, setelah Amerika Serikat (194 juta), India (130) juta, dan Brasil (102 juta). Adapun urutan kelima ditempati Meksiko dengan 60 juta pengguna (Kompas.com, 15/4/2016).

G. Definisi Konseptual

Suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan menentukan variabel yang akan saling berhubungan. Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

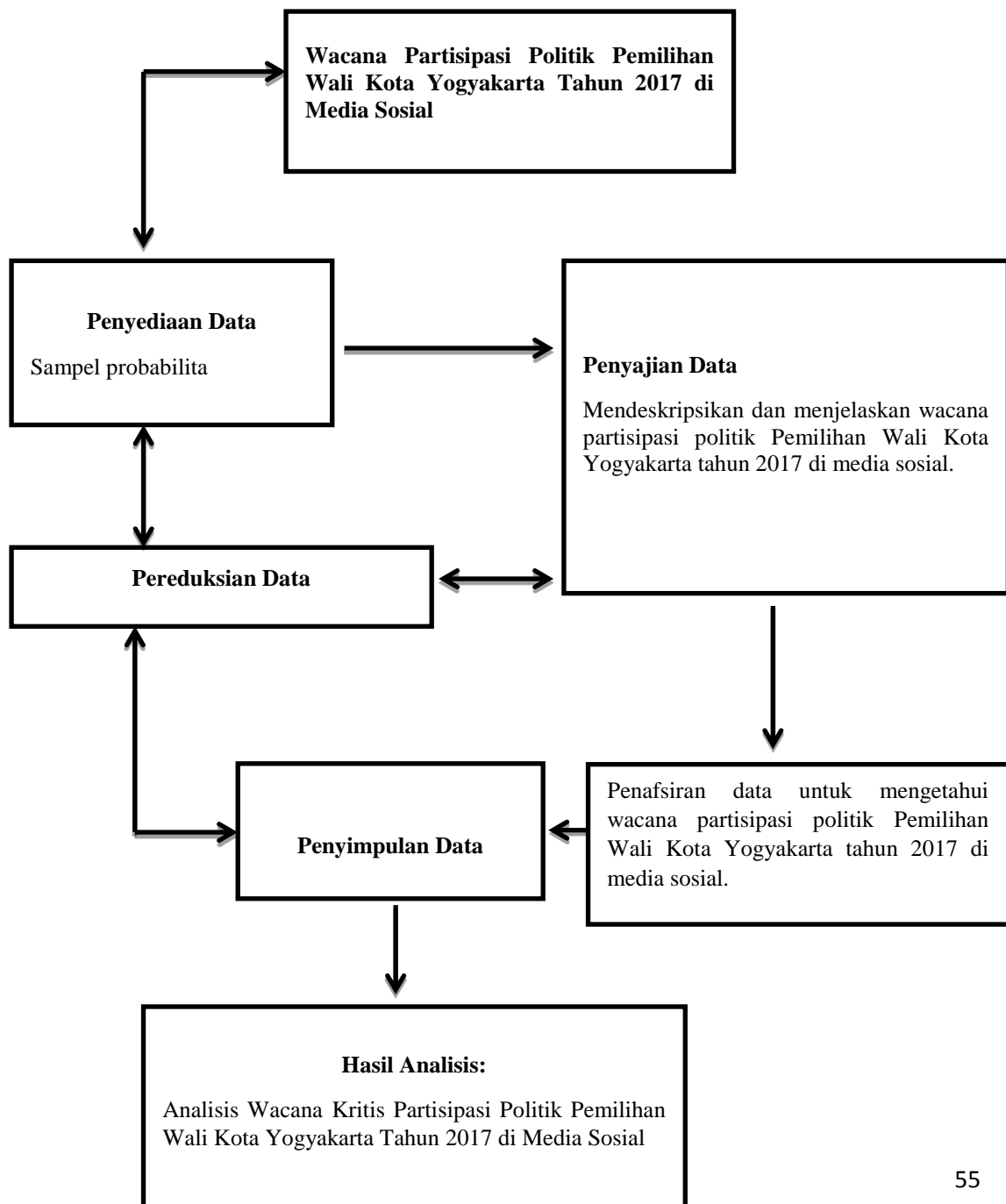
1. Analisis Wacana Kritis adalah penggunaan bahasa dalam tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial (dalam hal ini partisipasi politik) yang menunjukkan ideologi dari masyarakat Kota Yogyakarta, yang saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing mengenai Pemilihan Wali Kota Yogyakarta 2017.
2. Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan masyarakat Kota Yogyakarta dalam membagi pandangan atau ideologinya melalui wacana berupa teks di media sosial, seperti Facebook dan Twitter mengenai Pemilihan Wali Kota Yogyakarta 2017.
3. Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia pada 15 Februari 2017, termasuk di Kota Yogyakarta. KPUD Kota Yogyakarta telah menetapkan dua pasang kandidat peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2017 pada 25 Oktober 2016. Kedua pasang kandidat peserta Pemilihan Wali Kota Yogyakarta adalah Haryadi

Suyuti dan Heroe Purwadi dengan nomor urut satu serta Imam Priyono dan Achmad Fadil dengan nomor urut dua.

4. Media sosial adalah laman atau aplikasi, seperti Facebook dan Twitter yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi berupa wacana atau teks mengenai Pemilihan Wali Kota Yogyakarta 2017.

H. Definisi Operasional

Salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut.



I. Metode Penelitian

Penelitian terhadap wacana partisipasi politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial berdasarkan perspektif analisis wacana merupakan penelitian kualitatif. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan (1) jenis penelitian, (2) objek penelitian, (3) sumber data penelitian, (4) teknik pengumpulan data, dan (5) analisis dan interpretasi data. Kelima hal tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan akan dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Sukmadinata, 2005, hlm. 60). Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau data lisan di masyarakat bahasa (Djajasudarma, 2010, hlm. 11). Unsur yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah wacana partisipasi politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 di media sosial.

Sesuai dengan pendapat Moleong (2000, hlm 4-8), penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Penelitian kualitatif mengacu kepada teori dasar (*grounded theory*) yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual. Jenis penelitian kualitatif bersifat sementara, artinya disesuaikan secara terus-menerus sesuai dengan kenyataan data yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan jenis penelitian yang telah disusun secara ketat dan kaku.

Penelitian ini akan mengkaji sejumlah isu penting mengenai wacana partisipasi politik Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 melalui laman *facebook.com* dan *twitter.com*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada wacana/teks di media sosial, seperti Facebook dan Twitter sebagai representasi masyarakat dalam partisipasi politik terhadap Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017.

2. Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang dilaksanakan serentak pada 15 Februari 2017 di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Provinsi DIY.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan hasil dari Sensus Penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 636.660 jiwa (http://id.wikipedia.org/Kota_Yogyakarta).

Dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 636.660 jiwa, penulis hanya mengambil sampel sebagai data penelitian sebanyak 50 wacana/teks dari

pengguna aktif media sosial Facebook dan Twitter, yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non-kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamika responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Moleong, 2005).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengambilan sampel probabilita (*probability sampling*). Sampel probabilita adalah sampel dimana semua unit analisis dalam populasi mempunyai kesempatan sama terpilih sebagai sampel, dan dapat digunakan untuk generalisasi.

Teknik penentuan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009, hlm. 85). Menurut Arikunto (2010, hlm. 183), penentuan sampel secara *purposive* pada penelitian ini berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna aktif media sosial Facebook dan Twitter sebagai data sampel penelitian, sebagai berikut.

a. Masyarakat Kota Yogyakarta, yang merupakan pengguna aktif media sosial Facebook dan Twitter.

b. Masyarakat Kota Yogyakarta, yang membuat wacana atau teks pada media sosial Facebook dan Twitter mengenai Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017.

d. Narasumber/Informan

Penulis memilih narasumber yang merupakan masyarakat Kota Yogyakarta dan pengguna aktif media sosial Facebook dan Twitter serta berpartisipasi dalam Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 melalui wacana atau teks yang disampaikan pada media sosial Facebook dan Twitter.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa wacana/teks di media sosial, seperti Facebook dan Twitter sebagai representasi masyarakat dalam partisipasi politik terhadap Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017. Adapun sumber data penelitian ini adalah wacana atau teks dalam media sosial Facebook dan Twitter masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengambil data penelitian sebanyak 50 wacana/teks dari pengguna aktif media sosial Facebook dan Twitter mengenai Pemilihan Wali Kota Yogyakarta tahun 2017.

5. Analisis dan Intepretasi Data

Untuk menganalisis data-data wacana berupa teks dalam Facebook dan Twitter masyarakat Kota Yogyakarta mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta tahun 2017, penulis menggunakan analisis wacana kritis sebagai “payung” yang manaungi tingkat dan berbagai dimensi analisis wacana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2001, hlm. 7), bahwa analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.